

STRATEGI PENGUATAN EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN PELAKU UMKM PASCA PANDEMI COVID 19 MELALUI G-25

Mohtazul Farid¹, Moh. Ishaq Abdussalam²

¹Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Trunojoyo Madura

²Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Trunojoyo Madura

e-mail: Mohtazul.farid@trunojoyo.ac.id

Abstract - *The impact of the COVID-19 pandemic on the economy is being felt. Globally, in 2020 trading volume decreased by around 32 percent. The social restriction policy has weakened businesses in the fields of transportation, tourism, trade and health. Household businesses have been the worst hit by Covid 19. Many Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) have gone out of business. People's purchasing power is helpless. This article reveals several alternatives for strengthening the economy and empowering MSME actors, which are carried out by the G-25 community in Bangkalan Madura. This qualitative research data was obtained from the administrators, volunteers and beneficiaries of the G-25, through in-depth observations and interviews. There were 10 informants in this study. G-25 is a social community that is engaged in the social and economic fields of society. Its main activity is to collect funds from donors voluntarily. The funds were then used for community economic recovery activities after the pandemic. There are three main programs in strengthening the economy and empowering UMKM actors. Namely, the Social Charity assistance program, sustainable super micro UMKM empowerment and education empowerment programs for the poor. This research can be useful as a reference in designing models of economic strengthening, empowerment and business development of MSME actors after the COVID-19 pandemic..*

Keywords – *Strengthening the Economy, Empowering UMKM, G-25*

Abstrak - Dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi sangat terasa. Secara global, tahun 2020 volume perdagangan mengalami penurunan sekitar 32 persen. Kebijakan pembatasan sosial membuat usaha bidang transportasi, pariwisata, perdagangan, kesehatan melemah. Usaha rumah tangga, menjadi sektor yang paling terpuruk akibat Covid 19. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) banyak gulung tikar. Daya beli masyarakat tidak berdaya. Artikel ini mengungkap beberapa alternatif penguatan ekonomi dan

pemberdayaan pelaku UMKM, yang dilakukan oleh komunitas G-25 di Bangkalan Madura. Data penelitian kualitatif ini, diperoleh dari pengurus, relawan dan pemetik manfaat G-25, melalui observasi dan wawancara secara mendalam. Informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. G-25 merupakan komunitas sosial yang bergerak di bidang sosial, ekonomi masyarakat. Aktifitas utamanya, menghimpun dana dari para donatur secara sukarela. Dana itu kemudian digunakan untuk kegiatan pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi. Ada tiga program utama dalam penguatan ekonomi dan pemberdayaan pelaku UMKM. Yaitu, program bantuan Social Charity, pemberdayaan UMKM super mikro berkelanjutan dan program pemberdayaan pendidikan masyarakat miskin. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi dalam merancang model penguatan ekonomi, pemberdayaan dan pengembangan usaha pelaku UMKM pasca pandemic COVID 19.

Kata Kunci: *Penguatan Ekonomi, Pemberdayaan UMKM, G-25*

I. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 sangat berdampak buruk pada kesehatan dan perekonomian penduduk. Usaha kecil dan menengah (UMKM) sebagai salah satu pilar penyanggah perekonomian negara turut menerima dampak. Setidaknya 163.713 pelaku UMKM pada sektor makanan dan minuman terkena dampak pandemi Covid-19 (Thaha: 2020). Moody's investor Service meramalkan, pertumbuhan ekonomi akan melandai hingga angka 4,8 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Nilai ini jauh dibawah pertumbuhan ekonomi tahun 2019 yang berada di angka 5,02 persen. Perlambatan ini, diprediksi berlanjut hingga tahun ini, sekalipun ada sedikit penguatan sebesar 4,9 persen.

Kemenkop UMKM merilis data, 56 persen omset

penjualan pelaku UMKM turun drastis. 22 persen pada aspek pembiayaan, 15 persen pada aspek distribusi barang dan 4 persen mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku mentah. Kondisi ini harus diperhatikan serius, sebab, kontribusi UMKM sangat strategis bagi perekonomian Indonesia. Jumlah UMKM mencapai 62,9 juta dan menyerap 97 persen tenaga kerja dengan 89 persen di antaranya, pada sektor mikro. (Amri: 2020). Data penelitian Soetjipto (2020), mengungkapkan, 75 persen mengalami dampak penurunan penjualan. 51 persen pelaku UMKM hanya mampu bertahan 1-3 bulan. 67 persen berharap bantuan dana darurat untuk menyelamatkan usahanya. Selebihnya 13 persen pelaku UMKM yakin menghadapi situasi pandemi.

Salah satu karakteristik pelaku UMKM, utamanya di Kediri, yakni kemampuan sumber pendanaan usaha masih rendah. Memiliki jiwa wirausaha dengan sifat tekun, produktif, dan inovasi berpikir masih mendasar, sehingga masih berfokus pada kegiatan usaha yang bersifat rutinitas. (Fauji: 2020). Kondisi UMKM di Bangkalan, tidak jauh berbeda dengan Kabupaten Kediri. Untuk menghadapi situasi pandemic covid 19, masih bertahan pada pasar konvensional. Resiko penurunan omzet jual produk, sangat besar. Sebagian besar UMKM yang ada di Kota Salak ini, belum sepenuhnya siap menghadapi dampak Covid-19.

Dari total 22.500 UMKM yang ada di Bangkalan, semuanya meraskan menurunnya omset penjualan dan terancam gulung tikar. Tekanan beban biaya operasional dan biaya hidup, terkadang yang membuat pelaku UMKM menggunakan modal untuk belanja. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Menengah, Bangkalan, Iskandar Ahadiyat membenarkan, sebagian besar pelaku UMKM di Bangkalan mengalami penurunan omzet. Sebagian UMKM kehabisan modal usaha. Sehingga mereka kesulitan untuk melanjutkan usaha, apalagi mengembangkannya. Pemerintah memang memberikan bantuan senilai Rp 2,4 juta per UMKM, tetapi bantuan tersebut sangat terbatas. Dari 22.500, hanya mengajukan 10.500 UMKM. Hingga saat ini hanya 4.217 UMKM yang menerima bantuan tersebut.

Di tengah lesunya ekonomi pelaku UMKM di Bangkalan, muncul inisiatif dari relawan pemberdayaan komunitas untuk kembali menyehatkan ekonomi para pelaku UMKM

terutama di Bangkalan. Gerakan 25 ribu yang disingkat G-25 hadir sebagai komunitas pemberdayaan UMKM di Bangkalan. Sebuah komunitas kecil di luar pemerintah ini, sangat aktif membantu memberikan stimulus penguatan ekonomi para pelaku UMKM di Bangkalan. Program pemberdayaan yang dilakukan G-25, adalah bentuk konkrit dalam merespon persoalan yang dihadapi UMKM di tengah pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti selama ini, program pemberdayaan yang dilakukan G-25, mampu meningkatkan keberdayaan pelaku UMKM dalam menghadapi era new normal. G-25 membantu penguatan ekonomi pelaku UMKM, salah satunya memberi bantuan modal dan memantau pemanfaat modal untuk usaha. Ada beberapa hal yang menarik dan penting untuk diteliti lebih mendalam terkait model-model pemberdayaan yang dilakukan G-25. Apalagi, selama ini, G-25 tidak pernah terikat dengan lembaga pemerintah maupun NGO untuk menyalurkan bantuan UMKM.

II. METODE

Metode penelitian ini, menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Dalam penelitian ilmu sosial, fenomenologi adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara menggali dan mengungkapkan makna tersembunyi di balik pengalaman-pengalaman subjek (Creswell, 2013). Proses pengungkapan makna pengalaman subjektif menjadi makna objektif atau universal dilakukan dengan mendengarkan kisah pengalaman pribadi subjek dan selanjutnya menganalisis narasi yang disampaikan berdasarkan tema-tema untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Peneliti memilih pendekatan fenomenologi, agar dapat membongkar makna universal yang tersembunyi di balik fenomena subjektif yang dialami oleh subjek informan. Salah satu aspek penting metode fenomenologi adalah proses "bracketing out". Peneliti berusaha sejauh mungkin menanggalkan pengalaman dan dugaan-dugaan pribadi selama melakukan tahapan-tahapan penelitian. (Creswell, 2013). Pada konteks penelitian ini, melalui proses analisis fenomenologis, diharapkan akan diperoleh pemahaman tentang strategi pemberdayaan yang dilakukan komunitas local G-25 dalam menguatkan ekonomi pelaku UMKM di Madura.

Sebelum start penelitian, peneliti melakukan observasi lapangan guna memperoleh pemahaman awal mengenai lokasi dan subjek penelitian. Observasi akan dilakukan terutama di daerah yang menjadi pusat gerakan 25, terutama di Kab. Bangkalan. Lokasi penelitian sengaja dipilih di kota paling barat Madura. Sebab, fokus pemberdayaan yang dilakukan Komunitas G-25 di Bangkalan.

Penentuan informan didasarkan pada aspek kebutuhan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Subjek informan dibedakan dua. Informan utama dan informan pendukung. Informan utama adalah pengurus Komunitas G-25 yang aktif dalam melakukan pemberdayaan. Selain itu, informan utama lain, adalah para pelaku UMKM yang sudah mendapat bantuan dari G-25. Sementara itu, informan pendukung adalah para simpatisan yang menjadi donatur kegiatan pemberdayaan G-25. Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keberagaman latar belakang dan atribut identitas yang dimiliki oleh para informan.

Proses pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu melalui sumber data sekunder (rujukan literatur, berita media, dokumentasi ilmiah, gambar dan foto), dan sumber data primer melalui pengamatan lapangan dan wawancara mendalam. Wawancara mendalam akan dilaksanakan secara semi-terstruktur dengan bantuan panduan wawancara dan direkam secara digital. Data hasil wawancara selanjutnya akan ditranskrip dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia untuk dilakukan proses analisis.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan (Creswell, 2013). Pertama, pembacaan data dan pembuatan kode (coding), kluster (clustering) atau label (labelling) berdasarkan tema-tema yang paling muncul dalam proses wawancara. Dalam tahap ini juga dilakukan reduksi data yang tidak diperlukan. Kedua, proses pemilahan data sesuai tema yang paling relevan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Tidak semua tema yang muncul relevan dengan pertanyaan penelitian. Ketiga, melakukan interpretasi dan sintesis data hasil wawancara yang bersifat subjektif dan mengabstraksikannya agar ditemukan makna objektif atau universal dari temuan fenomena di lapangan.

Terakhir, peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan dan menyusun skema model berdasarkan hasil analisis Strategi Pemberdayaan yang dilakukan G-25 dalam membantu penguatan

ekonomi para pelaku UMKM di tengah pandemi covid 19.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Isu Pemberdayaan dan Penguatan Ekonomi Pelaku UMKM menjadi topik yang terus dibahas. Kajian dan penelitian juga sudah banyak dilakukan. Tetapi, masih sedikit bahkan belum ada yang secara khusus membahas bagaimana pemberdayaan tersebut dilakukan dengan model pemberdayaan komunitas. Apalagi pada situasi Pandemi covid-19 seperti sekarang. Sesuai hasil pencarian peneliti, sebagian besar riset yang dilakukan terkait penguatan ekonomi dan pemberdayaan UMKM, membahas tentang pengembangan Skill Pelaku UMKM dan Strategi pemasaran dari konvensional menuju era digital. Model pemberdayaan keilmuan untuk mengdongkrak penjualan. Penelitian tersebut lebih cocok dan pas pada situasi normal. sementara pada saat pandemi seperti saat ini, yang sangat mengguncang pelaku UMKM, selain anjloknya omset penjualan, juga yang paling utama adalah pemberian stimulus tambahan modal usaha. Pasalnya, para pelaku UMKM sudah tidak bisa lagi mengandalkan pinjaman lunak untuk modal usaha dari lembaga keuangan (Bank), seperti kredit usaha rakyat (KUR). Menunggu program bantuan stimulus modal dari Pemerintah sudah sangat terbatas dan tidak simultan dan terus menerus.

Amanatullah dkk, sudah melakukan penelitian tentang penguatan ekonomi pelaku UMKM di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Hasil penelitiannya mengungkapkan, bahwa pelaku UMKN kurang inovatifnya strategi pemasaran. Penyebabnya, pengetahuan teknologi para pelaku UMKM sangat lemah. Solusi yang ditawarkan, peneliti memanfaatkan community development mengorganisir pelaku UMKM untuk membentuk koperasi UMKM, sebagai wadah pemberdayaan. Selain itu, pengembangan UMKM menggunakan strategi marketing yang efektif dan tepat sesuai perkembangan teknologi. Salah satunya, memasarkan produk UMKM melalui media online. (Amanatullah, dkk: 2020).

Penelitian kualitatif tentang inovasi UMKM untuk menghadapi pandemi covid-19 jugas udah dilakukan oleh Maskarto Lucky Nara Rosmad. Hasilnya mengungkapkan, bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM), berupa inovasi dan kreativitas sangat mendukung keberlangsungan

kegiatan UMKM. Di masa Pandemi covid 19, peran pemerintah dan perbankan sangat dibutuhkan bagi pengembangan usaha kecil disamping dukungan dari stakeholder yang lainnya. (Maskarto: 2021).

Indah Andayan, dkk, memaparkan bahwa beberapa kendala yang dialami pelaku UMKM kabupaten Kediri terletak pada proses pemasaran produk. Strategi pemberdayaan yang paling dibutuhkan pelaku UMKM, adalah pemberdayaan pemasaran produk secara online. Butuh platform market digital dan dapat melalui strategi pemberdayaan inovasi produk UMKM untuk beralih pada produk yang paling dibutuhkan (masker, hand sanitizer). (Indah dkk: 2021).

Sampai sekarang, tidak ada pemimpin Negara termasuk Indonesia, yang berani menjamin pandemi Covid-19 akan selesai 2021. Untuk itu, UMKM selaku entitas bisnis harus dapat mengelola manajemen business cycle dengan memperhatikan kategori jenis bisnisnya pada 4 siklus bisnis, 1. Puncak Siklus (Kemakmuran) 2. Resesi (Kemerostotan), 3. Palung (Depresi Paling Parah) 4. Pemulihan (Ekspansi). Dengan manajemen business cycle yang baik dan perubahan bisnis model dan transformasi digital, UMKM diprediksi berhasil mengatasi tantangan pandemi, menurut penelitian Siti Nuzul Laila (2021).

Penelitian Husni Awali dan Farida Rohma (2020) menyimpulkan, untuk bertahan di era pandemi Covid 19, pelaku UMKM harus memanfaatkan e-marketing seperti marketplace untuk berjualan. Penerapan e-marketing diyakini berdampak positif terhadap ketahanan ekonomi UMKM di Kota Pekalongan. Proses produksi tetap berlangsung dan distribusi barang kepada konsumen tidak terkendala kebijakan social distancing. Sayangnya, penelitian ini, tidak bisa diterapkan pada para pelaku UMKM yang mengalami gagap teknologi dan kehabisan modal akibat Pandemi covid seperti yang terjadi di Bangkalan.

Selain persoalan di atas, masalah lain yang dihadapi UMKM di masa Pandemi adalah lemahnya akses informasi pasar. Pemasaran produk kurang mempunyai daya saing di pasar global. Pola konsumsi masyarakat yang lebih memilih produk luar negeri menjadi salah satu faktor kurang berkembangnya UMKM. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak agar

UMKM tepat mampu bertahan dalam menghadapi arus persaingan global, mengingat UMKM mampu menyelamatkan perekonomian dari krisis ekonomi. Oleh karena itu, dalam upaya penguatan UMKM sebagai fundamental ekonomi nasional, perlu kiranya diciptakan iklim investasi domestik yang kondusif dalam upaya penguatan pasar dalam negeri agar UMKM dapat menjadi penyangga (buffer) perekonomian nasional. Penguatan UMKM ini diharapkan menjadi pilar membangun ekonomi bangsa dimana fundamental perekonomian Indonesia belum dapat dikatakan terbangun kokoh, sehingga perlu membangun struktur ekonomi dengan mempertimbangkan keberadaan UMKM dan memberikan peluang usaha bagi UMKM dalam berbagai sektor ekonomi.

Perkembangan dan peran UMKM perlu terus ditingkatkan karena ketangguhannya dalam menghadapi berbagai krisis ekonomi serta banyak membuka lapangan pekerjaan yang tentunya akan mengurangi tingkat pengangguran. Menurut perkembangannya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok: 1) Livelyhood Activity: kelompok usaha sektor informal yang usahanya digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan hidup sehari-hari; 2) Micro Enterprise: kelompok usaha ini melakukan kegiatan yang sifatnya cenderung sebagai pengrajin. Ia memiliki kemampuan menghasilkan suatu produk namun belum memiliki sifat kewirausahaan untuk memajukan produknya; 3) Small dynamic enterprise: kelompok usaha yang menjalankan bisnisnya telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan sub-kontrak dan ekspor; 4) Fast moving Enterprise: kelompok ini selain telah memiliki jiwa kewirausahaan, juga memiliki tujuan memajukan usahanya dengan melakukan transformasi menjadi usaha besar (Surya: 2015).

Menurut Effendi Ishak, (2005) informasi pasar produksi atau pasar komoditas yang diperlukan misalnya (1) jenis barang yang dibutuhkan, (2) daya beli masyarakat, (3) harga pasar yang berlaku, (4) selera konsumen pada pasar lokal, regional, maupun internasional. Dengan demikian, UKM dapat mengantisipasi berbagai kondisi pasar sehingga dalam menjalankan usahanya akan lebih inovatif. Sedangkan informasi pasar faktor produksi meliputi: (1) sumber bahan baku yang

diperlukan, (2) harga bahan baku, (3) bagaimana memperoleh modal usaha, (4) siapa tenaga kerja yang profesional, (5) tingkat upah atau gaji yang layak. Oleh karena itu peran pemerintah sangat diperlukan dalam mendorong keberhasilan UMKM dalam memperoleh akses memperluas jaringan pemasarannya. Selain memiliki kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh informasi pasar, UMKM juga perlu memiliki kemudahan dan kecepatan dalam mengkomunikasikan atau mempromosikan usahanya kepada konsumen secara luas baik di dalam maupun di luar negeri.

Naisbit, 1994 (dalam Singgih), meramalkan, bahwa perkembangan ekonomi dunia akan didominasi oleh usaha kecil dan menengah, dengan kata lain negara yang memiliki jaringan yang kuat pada usaha kecilnya akan berhasil dalam persaingan dipasar global. Hal ini, sesuai kondisi perekonomian masyarakat kelas bawah sangat tergantung pada ketersediaan lapangan kerja lokal dan usaha kecil di desa, kecamatan dan kabupaten. Semakin banyak pelaku UMKM maka dipastikan semakin makmur ekonomi masyarakat bawah.

Di tengah Pandemi Covid 19 ini, semua pelaku UMKM, utamanya di Kabupaten Bangkalan mengalami *shock*, baik secara omset penjualan, model pemasaran apalagi modal usaha. Kehadiran gerakan 25, ini sangat dirasakan dapat membantu memberikan penguatan modal dan pemberdayaan berkelanjutan terhadap para pelaku UMKM yang ada di Bangkalan. Model pemberdayaannya juga sederhana layaknya pemberdayaan yang dikonsepsikan oleh Edi Suharto sebagai pemberdayaan Komunitas (Community Empowerment).

2.2. Komunitas Lokal dan Efektifitas Pemberdayaan

Secara sederhana, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses yang mengantarkan orang lain mendapat skill, pengetahuan, akses modal dan kekuasaan yang dapat merubah nasib hidup dan ekonominya. (Suharto: 2013). Indikator keberhasilan pemberdayaan adalah kemandirian setiap individu dalam menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya. (Sumodiningrat: 2000). Hal ini selaras dengan hasil penelitian Sulistyani (2004), yang menyatakan bahwa keberdayaan masyarakat meliputi kemandirian. Lebih lanjut, Sulistyani menjelaskan, secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan. Simon (1993)

berpendapat bahwa pemberdayaan merupakan suatu aktivitas refleksi, suatu proses yang mampu diinisiasikan dan dipertahankan hanya oleh agen atau subyek yang mencari kekuatan atau penentuan diri sendiri (self-determination). Pranarka dan Vidhyandika (1996) menjelaskan bahwa proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan.

Memberdayakan masyarakat juga membantu negara karena mengurangi angka kemiskinan, walaupun negara sudah tergolong maju tetapi masih banyak masyarakat yang dibawah rata-rata dalam hal ekonomi. Walaupun komunitas ketimbang ngemis tergolong komunitas kecil, tetapi banyak manfaat untuk elemen yang besar yaitu negara. Jadi yang memberdayakan masyarakat miskin tidak hanya negara melainkan juga masyarakat yang lebih mampu, dimana jika ada pemahaman dan saling membantu untuk memberdayakan masyarakat, pasti masyarakat miskin akan berkurang dengan cepat. Seperti halnya komunitas gerakan 25 ribu yang memberdayakan sebagian masyarakat miskin, terutama para pelaku UMKM yang bangkrut di Bangkalan.

Konsep pemberdayaan Narayan (2002) beda lagi. Menurutnya, pemberdayaan meliputi: Empowerment is the expansion of assets and capabilities of poor people to participate in, negotiate with, influence, control, and hold accountable institutions that affect their lives. Pemberdayaan adalah sebuah intervensi guna memperkuat sumberdaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kapasitasnya agar dapat menentukan sendiri masa depannya. Definisi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan bertujuan untuk melakukan proses perubahan agar masyarakat memahami manfaat dan peranannya dalam program pembangunan, mampu merumuskan kebutuhan dengan potensi/sumberdaya yang dimiliki, mampu menentukan prioritas masalah yang akan dipecahkan sesuai dengan kebutuhan dan potensinya, serta mampu menyusun rencana kegiatan untuk menangani atau menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Mengingat pemberdayaan sebagai suatu proses, maka implementasi pemberdayaan mengedepankan proses daripada hasil (output).

Menurut Ife (1995), ada tiga strategi dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu melalui kebijakan dan perencanaan, aksi sosial dan politik,

pendidikan dan penyadaran. Pemberdayaan melalui kebijakan dan perencanaan diterima dalam pengembangan atau perubahan struktur dan kelembagaan untuk akses yang lebih merata terhadap sumber daya, kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Pemberdayaan melalui aksi sosial menekankan pentingnya perjuangan politik & perubahan dalam mengembangkan kekuatan efektif. Pemberdayaan melalui pendidikan dan penyadaran mengembangkan pentingnya proses pendidikan yang dapat melengkapi warga masyarakat untuk meningkatkan kekuasaannya.

Secara historis, konsep pemberdayaan masyarakat muncul dari gagasan atau ide bahwa pembangunan sebuah masyarakat atau komunitas harus berpusat pada masyarakat itu sendiri (*people centered development*) dan bukan pada pembangunan masyarakat yang diinisiasi oleh negara atau pemerintah yang mengutamakan pendekatan pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik dan keamanan seperti yang banyak dijalankan oleh negara-negara dunia ketiga. Berangkat dari konteks tersebut, dapat dikatakan bahwa konsep pemberdayaan masyarakat merupakan kritik dari pendekatan pembangunan masyarakat yang mengutamakan konsep pertumbuhan ekonomi semata dan cenderung mengabaikan kepentingan dan suara-suara dari masyarakat (Soetomo: 2011). Dengan demikian, pemberdayaan yang paling efektif adalah pemberdayaan yang berangkat dari inisiasi dan kepedulian masyarakat (komunitas), khususnya komunitas lokal.

Menurut Hermawan (2008), komunitas adalah sekelompok atau kumpulan individu yang memiliki kepedulian satu sama lain lebih dari jumlah seharusnya, dimana sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antara para anggota komunitas tersebut terhadap suatu ketertarikan hal yang sama. Ewusie (1990), menjelaskan bahwa pengelompokan yang terjadi pada suatu komunitas dapat diakibatkan karena nilai ketahanan hidup kelompok terhadap berbagai kondisi. Komunitas juga dapat memiliki kombinasi dalam kesamaannya, misalnya kesamaan geografis dan sosial seperti pada kota-kota tua yang berisikan para imigran dari suatu negara (Golab, 1982; Masey, 1985; Portes and Mining, 1986 dalam Chaskin, 2001). Pendapat tersebut di perkuat oleh Soenarno (2002) komunitas adalah sebuah

identifikasi dan interaksi social yang dibangun dengan berbagai dimensi kebutuhan fungsional. Kekuatan pengikat suatu komunitas, terutama, adalah kepentingan bersama dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sosialnya yang biasanya, didasarkan atas kesamaan latar belakang budaya, ideologi, sosial-ekonomi.

Di Bangkalan Madura, terdapat sebuah komunitas yang sangat peduli dan konsen melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin, khususnya pelaku UMKM. Komunitas yang bernama Gerakan 25 ribu ini, melakukan kegiatan pemberdayaan mulai dari menghimpun uang, mencari calon penerima manfaat dan mendamping penerima manfaat dalam menjalankan usahanya hingga berdaya dan mandiri secara ekonomi. Program Pemberdayaan yang dilakukan komunitas G 25 bertujuan, membangun kemandirian individu, meningkatkan kesadaran masyarakat akan potensi diri dan lingkungan, melatih & meningkatkan kapasitas masyarakat untuk melakukan perencanaan dan pertanggungjawaban dan mengaja masyarakat sekitar memiliki rasa kepedulian terhadap orang lain yang kesussahan dan terakhir mengurangi kemiskinan di daerah.

Berawal Dari Kepercayaan dan 25 Ribu

Secara historis, komunitas G-25 terbentuk pada bulan Maret 2019. Nama G-25 merupakan singkatan dari gerakan 25 ribu. Inisiator komunitas ini adalah Dasuki Rahmat. Kemudian, mantan Ketua Cabang GMNI Bangkalan ini, mengajak koleganya, Rusman Hadi, mantan Ketua Cabang PMII Sumenep, Antok dan Gumawan. Empat aktifis itu kemudian membicarakan secara serius terkait komunitas tersebut. Dalam pembicaraan itu, muncul nominal uang yang hendak dikumpulkan dari calon donatur. Ada yang mengusulkan Rp 10 ribu, 20 ribu, 50 ribu dan 100 ribu. Akhirnya, disepakati Rp 25 ribu, dengan alasan, nominal tersebut sangat terjangkau bagi semua kalangan. Sejak saat itu, komunitas gerakan sosial ini berjalan secara bertahap, hingga saat ini sudah memiliki ratusan donatur dan relawan. Untuk donatur, yang tetap dan tidak tetap. Donatur tetap sebanyak 14 orang, secara rutin mendonasikan uangnya setiap bulan. Nominal sumbangan dari donatur tetap bervariasi. Paling rendah 200 ribu dan paling tinggi 1 juta. Untuk donatur tidak tetap jumlah mencapai puluhan orang. Nilai sumbangannya berkisar

antara Rp 50 ribu hingga Rp 500 ribu.

"Sumbangan dana dari donatur tidak tetap, bukan sebuah keharusan setiap bulan. Bergantung rezekinya. Kita (pengurus G-25), tetap memasukkan mereka dalam sebuah group WA. Sehingga dapat mengakses semua informasi aktifitas G-25, salah satunya update perkembangan hasil penghimpunan dana," (Wawancara Dasuki Rahmat Oktober 2021)

Dasuki menambahkan, awalnya, perolehan dana dari donatur sangat sedikit. Sehingga jumlah penerima dan bentuk bantuan yang disalurkan tidak terlalu banyak. Yang menarik, walaupun, konsepnya mengumpulkan uang Rp 25 ribu, pada prakteknya, tidak ada satupun donatur tetap yang menyumbang Rp 25 ribu. Besaran bantuan donatur Rp 50.000 hingga 1,5 juta. Saat ini, dana yang terhimpun setiap bulan antara Rp 6.000.000 - 10.000.000. Dengan demikian, G-25 dapat memberikan bantuan kepada pelaku UMKM yang bangkrut hingga 2 orang setiap bulan. Pemberian bantuan kepada pelaku UMKM tidak berbentuk uang. G-25 membantu dengan bentuk barang yang dibutuhkan pelaku UMKM untuk menjalankan usahanya. Contoh, pelaku usaha dibidang makanan, maka uang dari donatur akan dibelanjakan untuk membeli bahan baku untuk makanan. Setelah bantuan tersebut diserahkan, G-25 akan melakukan pendampingan terhadap pelaku UMKM yang sudah dibantu.

Selain gerakan sosial, G-25 sebagai bentuk otokritik terhadap pemerintah. Terdapat berbagai program pemerintah untuk warga miskin, baik sosial, pemberdayaan ekonomi, pendidikan dan kesehatan, akan tetapi tidak terlihat dampaknya. Penyebabnya, mekanisme dan model penyaluran program tersebut, kurang tepat. Contoh program keluarga harapan (PKH) dan Rastra. Bentuk bantuan berupa uang dan sembako tersebut banyak potongan. Salah satu penyebabnya, proses pendistribusian murni dikelola dan dikuasai oleh birokrasi desa. Data penerima tidak pernah diperbaharui. Sehingga, tidak heran jika banyak ditemukan warga yang sebenarnya sangat layak menerima bantuan, tidak masuk dalam data penerima. Sebaliknya, ada penerima bantuan yang memiliki kehidupan layak. Program pemerintah, jarang berbasis pemberdayaan berkelanjutan.

"Melihat kondisi ini, kami merasa empati dan prihatin. Sehingga kami berinisiatif untuk melakukan kegiatan sosial yang berguna untuk menopang warga miskin. Terutama mereka yang tidak tersentuh

program pemerintah. Pembicaraan dilakukan dengan para aktivis mahasiswa dan beberapa tokoh yang memiliki kepedulian tinggi. (Wawancara Dasuki Rahmat Oktober 2021)

Setelah dua tahun berjalan, yayasan G-25 Indonesia, mulai menjadi asa baru bagi masyarakat, terutama di Kabupaten Bangkalan. Banyak warga yang lebih berharap bantuan dan program G-25 ketimbang bantuan dari pemerintah. Alasannya, program bantuan dari pemerintah, sistem dan teknisnya rumit dan sangat birokratis. Malah, sudah menjadi rahasia umum, bantuan dari pemerintah selalu ada potongan. Baik dari birokrasi desa maupun pihak penyalur lain. Sementara program bantuan dari G-25 sangat simple, tidak ribet, sederhana. bantuan utuh sesuai kebutuhan warga.

Di usia-nya yang menginjak 3 tahun, sudah 100 lebih warga penerima manfaat, yang berhasil bangkit dari jerat kemiskinan. Setidaknya, mereka yang mendapat bantuan modal usaha, sudah mandiri secara ekonomi, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pokok rumah tangganya, sehari-hari. Hasil refleksi, G-25 memutuskan berada dijalur perjuangan untuk warga miskin. G-25 masih mendapati bantuan pemerintah kurang tepat sasaran. Mereka yang mendapatkan bantuan, biasanya yang lebih dekat dengan kepala desa. Sementara warga miskin yang sangat membutuhkan, tetapi tidak dekat dengan pejabat desa terabaikan. Bahkan, mirisnya lag, G-25 menemukan warga miskin meninggal karena tidak tertangani dengan baiki lantaran tidak memiliki biaya berobat.

G-25 Indonesia lahir sebagai ikhtiar membantu masyarakat miskin. Khususnya yang tidak terfasilitasi oleh program-program pemerintah. Sekalipun terfasilitasi, namun belum menyelesaikan masalah-masalah ekonomi masyarakat. Melalui gerakan uang receh, G-25 telah berhasil mengatrol sedikitnya 100 orang dari dasar jurang kemiskinan. Tugas dan tanggungjawab G-25 Indonesia semakin berat. Apalagi, beberapa relawan dan masyarakat sudah meminta G-25 membuka cabang di seluruh Indonesia. Permintaan pembukaan cabang Pasuruan, Bojonegoro dan Sidoarjo. Akan tetapi, sementara fokus pengembangan di Sampang, Pamekasan, dan Sumenep pada tahun 2022.

Model Penghimpunan Dana

Sejak berdiri dan beroperasi, G-25 menjalankan sistem donasi terbuka. Gerakan ini tidak membatasi hanya pada donatur yang sudah mapan. Menurut informasi Rusman Hadi, Bendahara G-25, semua donatur yang bergabung dengan gerakan ini, atas inisiatif sendiri. Mayoritas dari mereka berdonasi setelah melihat dan menyaksikan sejumlah program G-25. Relawan G-25 tidak pernah mengajak calon donatur untuk berdonatur, apalagi melakukan penggalangan dana di pinggir jalan, apalagi datang ke rumah-rumah warga. Para donatur G-25, berdonasi atas kesadaran dan ketertarikan pribadi. Hal itu terjadi setelah melihat kegiatan sosial G-25, yang disebar melalui media sosial.

Dana yang terhimpun dikelola dengan sangat transparan. Sekalipun, para donatur tidak meminta laporan pertanggungjawaban bulanan kepada pengurus G-25. Setiap bulan, uang masuk dan keluar selalu dilaporkan secara rinci. Alokasi penggunaan dana terekam baik secara administrasi maupun dokumentasi. Berdasarkan data keuangan bulan November 2021, kas G-25 Rp 10.298.482. Jumlah ini gabungan dari sisa saldo bulan Oktober Rp 3.692.999 dan sumbangan 51 donatur, bulan November sebesar Rp. 6.605.483. Dana tersebut kemudian disalurkan kepada penerima manfaat yang sudah didata dan dipandang layak. Setiap bulan minimal 2 penerima manfaat yang mendapat bantuan modal usaha berskala mikro.

Kepada peneliti, Imam Hidayat, 40, Warga Desa Ujung Piring, Kecamatan Bangkalan, mengaku mendapat bantuan program bantuan usaha super mikro dari Yayasan G-25 Indonesia. Pria yang sehari-hari bekerja mancing ikan ke tengah laut ini, memiliki penghasilan sangat kecil. Dari sisi pendapatan, Imam tergolong warga sangat miskin. Setelah mendapat bantuan dari G-25, cak Mat dapat menjalankan usaha kecil-kecilan berupa produksi ikan asin. Ikan dari hasil mancing kadang ia keringkan menjadi ikan asin. Dari usaha itu, sedikit membantu kehidupan keluarganya. Bantuan yang diberikan G-25 Indonesia, berupa modal usaha, kebutuhan untuk usaha ikan asin. Mulai dari plastik agar kemasannya lebih menarik, bumbu, garam, ikan yang akan diasinkan, timbangan serta beberapa kebutuhan lainnya.

Relawan dan Penerima Manfaat

Dalam menjaga kredibilitas organisasi, G-25 memiliki beberapa struktur pengurus dan relawan.

Semua pengurus dan relawan tidak dibayar. Sejak awal bergabung dengan G-25, mereka didoktrin bahwa G-25 merupakan murni gerakan sosial, bukan organisasi yang berorientasi pada keuntungan materi. Untuk itu, setiap kegiatan G-25, seperti survei calon penerima manfaat hingga penyaluran bantuan, tidak ada dana transportasi, akomodasi serta anggaran lain. Pengurus dan relawan G-25 sangat menjaga komitmen untuk membantu masyarakat. Sejak awal sudah ditanamkan sikap rela berkorban untuk masyarakat. Ada penanaman nilai-nilai perjuangan. Manfaatnya akan dipetik diakhirat. Ada sebuah prinsip sebagai nilai dasar dari G-25, bahwa, membantu orang lain pada hakikat akan mempermudah urusan diri sendiri, baik secara materi maupun non materi.

"Saya meyakinkan mereka (pengurus dan relawan), apa yang kita lakukan dalam G-25 akan mendatangkan rezeqi yang tidak terduga dari luar. Baik rezeqi uang, kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan kita. Hal-hal baik yang kita berikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan akan diganti oleh Allah dari jalan yang tidak kita sangka," Wawancara Dasuki Rahmat, Oktober 2021.

Doktrin nilai-nilai tersebut sangat efektif dalam menjaga kredibilitas G-25. Relawan dan pengurus memiliki komitmen yang sama, yakni melakukan aksi sosial. Bahkan, selama mengurus G-25, pengurus dan relawan tidak pernah mendapatkan keuntungan materi, malah sering berkorban materi. Selain itu, doktrin tersebut untuk mencegah konflik dalam organisasi. Menurut Dasuki, salah satu faktor kehancuran sebagian besar organisasi sosial, adalah masalah uang, kecemburuan sosial, korupsi dan perbedaan komitmen. Untuk itu, sekalipun donatur menganjurkan sebagian dana hasil donasi digunakan untuk biaya operasional, pimpinan pengurus G-25 menolak. Menurut Dasuki, komitmen tersebut bagian prinsip. Indikator soliditas dan kemurnian niat para pengurus dan relawan dalam membantu masyarakat. Menjaga nama baik dan keberlangsungan organisasi G-25.

"Komitmen ini malah menjadi media seleksi paling efektif. Ada relawan atau pengurus yang tidak bertahan lama di G-25. Kita biarkan, kami bergerak secara sukarela rala berkorban untuk masyarakat. Relawan dan pengurus yang bertahan, itulah yang benar-benar memiliki komitmen untuk membesarkan G-25 dan

membantu masyarakat,” Wawancara Dasuki Rahmat, Oktober 2021.

Dari kacamata sosiologi, relawan dan pengurus G-25 merupakan aktor. Sebagai aktor, memiliki kebebasan untuk bertindak sesuai pertimbangan rasional. Tindakan pengurus dan relawan tergolong pada rasionalitas nilai. Tindakan yang berdasar pertimbangan nilai-nilai yang akan diperoleh dari perbuatan baik. Keuntungan yang diperoleh tidak berbentuk materi (abstrak). Keyakinan aktor terhadap tindakan baik yang dilakukan, akan mendatangkan kebaikan, ini nilai rasionalitas bagi mereka. Hal ini terlihat pada Dasuki Rahmat, selaku ketua G-25 dan beberapa relawan, rela bekerja tanpa dibayar bahkan harus berkorban materi dan waktu. Padahal, sebagian relawan ada yang lulusan S1 dan tidak bekerja. Dasuki dan Rusman hadi, memiliki keluarga dan anak, tetapi tetap komitmen mengurus G-25. Termasuk memilih warga yang akan mendapatkan bantuan dari G-25.

Penerima manfaat G-25 dipilih berdasarkan tingkat kelayakan. Informasi dari Dasuki, penerima manfaat merupakan warga yang diusulkan oleh warga lain. Usulan tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan survey. Relawan G-25, menggali informasi nama-nama yang masuk. Informasi tentang kondisi ekonomi calon penerima manfaat digali dari para tetangganya. Dengan demikian, bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Untuk penerima bantuan sembako dan uang, adalah warga yang benar-benar tidak berdaya secara ekonomi, karena faktor penyakit, sebatang kara atau korban PHK. Untuk penerima bantuan modal usaha adalah warga memiliki potensi untuk berusaha tetapi terkendala modal.

Hingga November 2021, sudah hampir 100 pelaku UMKM super mikro yang mendapat bantuan modal usaha dari G-25. Setiap bulan, minimal ada 3 pelaku usaha yang dibantu. Rata-rata mereka berpenghasilan dibawah standart kehidupan layak. Penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Guna menambah penghasilan tersebut, G-25 menstimulus dengan usaha super mikro. Bantuan yang diberikan juga tidak berbentuk uang, tetapi kebutuhan untuk berwirausaha. Jenis usaha disesuaikan dengan kemampuan calon penerima manfaat. Sehingga, dalam memberi modal usaha, dipastikan penerima manfaat dapat menjalankan usahanya dengan baik dan menguntungkan. Untuk

sementara, bantuan modal usaha masih berkisar antara 2 juta hingga 5 juta. Pengurus dan relawan G-25 belanja sendiri untuk kebutuhan usaha calon penerima manfaat.

Strategi Penguatan Ekonomi Masyarakat Pasca Pandemi

Pada awalnya, G-25 memanfaatkan dana hasil donasi masyarakat untuk pemberdayaan pelaku UMKM. G-25 menambah program non pemberdayaan berupa bantuan Social Charity. Program bantuan uang tunai ini muncul karena melihat dampak pandemic covid 19 pada masyarakat kecil. Bantuan ini khusus untuk warga yang berpenghasilan rendah dan tidak memiliki usaha. Kaum manula, janda, penderita penyakit lumpuh, berkebutuhan khusus dan yatim piatu. Selain kategori tersebut, sasaran program ini adalah mereka yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan dari pemerintah. G-25 menyeleksi secara ketat untuk menetapkan penerima program ini. Identitas penerima didapat dari hasil survei relawan G-25. Adapun nilai bantuan disesuaikan dengan kondisi anggaran yang ada. Program ini sebagai

Program ini merupakan program jangka pendek. Tujuannya, mengurangi beban ekonomi keluarga dalam satu keluarga, ini semata-mata untuk meringankan beban ekonomi masyarakat akibat COVID 19. Program ini mendukung pemerintah dalam membuat jaring pengaman sosial. Pemberian bantuan Social Charity diberikan kepada masyarakat yang tidak menerima PKH, BST dan bantuan sosial lain pemerintah. Selain itu, G-25 berharap, dengan adanya program bantuan tersebut, dapat menjaga daya beli masyarakat yang mulai menurun akibat pandemi. Terutama, masyarakat di pedesaan. Ketika daya beli tetap terjaga atau meningkat, dapat membantu pemulihan ekonomi masyarakat desa.

”Kami menyadari, program ini memiliki dampak positif dan negatif. Sisi positif dapat meningkatkan daya beli masyarakat, sebagai perlindungan sosial ekonomi pada masa pandemic. Sisi negatifnya menimbulkan kecemburuan sosial, ketergantungan masyarakat terhadap pemberian dan mengurangi anggaran kami untuk pemberdayaan. Tetapi, daripada kita tidak berbuat apa-apa untuk masyarakat,” Wawancara Dasuki Rahmat, Oktober 2021.

Untuk mendukung program ini, G-25 tidak

hanya berfokus terhadap hasil sumbangan donatur tetap dan tidak tetap. Relawan juga menggalang bantuan dari pada dermawan yang bersedia memberikan bantuan langsung tunai. Seperti kolega dari anggota DPR, pengusaha maupun kontraktor. Pemberian bantuan sosial ini dilakukan setiap bulan dan momentum lain, seperti menjelang lebaran. G-25 mengumpulkan sembako dan uang dari para dermawan untuk disalurkan kepada kaum dhuafa.

Program bantuan Social Charity G-25, sangat membantu pemerintah dalam melindungi masyarakat (Social Protection) terdampak COVID 19. Tujuan utamanya, menekan angka kemiskinan. Asian Development Bank membagi social protection dalam lima bagian. (1) labor markets, (2) social insurance, (3) social assistance, (4) skema mikro dan area-based untuk perlindungan bagi komunitas setempat, (5) child protection. World Bank mengartikan social protection sebagai: (1) jejaring pengaman dan spring board, investasi pada SDM, upaya menanggulangi pemisahan sosial, berfokus pada penyebab, bukan pada gejala dan mempertimbangkan realitas. (Tutdin dan Thahura, 2021).

Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2011), terdapat langkah-langkah penanggulangan kemiskinan akibat pandemi COVID 19. Antara lain, meningkatkan program social protection, bantuan sosial berbasis keluarga, menambah akses rumah tangga pada pelayanan dasar, dukungan ketersediaan layanan pendidikan dan kesehatan. Pemberdayaan masyarakat yaitu keputusan masyarakat terhadap kebutuhan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif melalui UMKM, usaha, infrastruktur/konektivitas, pembangunan pertanian dll. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam menangani kemiskinan di masa Pandemi Covid ini, salah satunya dengan memberikan BLT kepada masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena pandemi. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat dapat memanfaatkan peluang tersebut, untuk meningkatkan kesejahteraan, mempertahankan hidupnya dimasa pandemi, oleh karena itu diberikan bantuan secara bertahap seperti di awal tahun 2020. Pemerintah memberikan BLT tentu mempunyai tujuan yang jelas agar dapat membantu perekonomian masyarakat dimasa pandemi, dan mengurangi

aktivitas di luar rumah, dan menurunkan angka kemiskinan.

Program BLT dari pemerintah sudah berjalan maksimal. Hanya saja, belum mampu menyentuh semua masyarakat. Ada skala prioritas dalam program tersebut. Antara lain, warga yang kehilangan pekerjaan akibat PHK, dan keluarga yang terkena COVID 19. Sementara, warga yang tidak memiliki penghasilan akibat lansia, manula dan lumpuh, belum tercover secara keseluruhan. Kondisi ini yang dilihat oleh G-25, sehingga mengeluarkan program bantuan Social Charity. Menurut Dasuki, setidaknya ada 12 orang yang mendapat bantuan uang dan sembako dari G-25. Penerima bantuan berdasarkan usulan dari relawan kemudian diseleksi secara ketat. Mempertimbangkan aspek kebutuhan terhadap bantuan.

Secara sosiologis, kemiskinan termasuk fenomena sosial yang sulit dihilangkan dari kehidupan masyarakat. Studi masalah-masalah sosial, hanya mampu menekan dan mengurangi, tidak mampu menghapus kemiskinan. Pasalnya, kemiskinan merupakan bagian dari kehidupan dan keteraturan sosial. Pandemi COVID 19 berdampak nyata terhadap peningkatan angka kemiskinan. Dalam kacamata fakta sosial Emile Durkheim, kemiskinan yang terjadi akibat pandemi di luar kehendak individu. Kemiskinan sebagai bagian dari fakta sosial dapat dikaji dari 3 hal. Pertama, Eksternal (luar individu), maknanya bahwa keberadaan fakta sosial dimulai sejak sebelum individu itu ada dan akan selalu ada meskipun individu tersebut tiada. Kedua, Determinan Coercive, yaitu fakta sosial yang mengharuskan setiap individu agar selaras dengan fakta sosial. Ketiga, General, yaitu bahwa fakta sosial tersebar sampai luar komunitas atau masyarakat, merupakan milik bersama, bukan milik individu. (Sanderson, 2011).

Potensi bertambahnya kemiskinan masyarakat di era pandemi, berkaitan dengan faktor eksternal dan Determinan Coercive. Salah satunya, kebijakan pemerintah terkait pembatasan sosial. Masyarakat dilarang berjualan yang menciptakan kerumuman. Hal ini menunjukkan sifat yang memaksa sehingga fakta yang ditemukan di lapangan beberapa orang menolak anjuran ini. Akibatnya, banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Sementara masyarakat berhak untuk bertahan hidup dan mendapatkan perlindungan dari

Pemerintah, salah satunya program bantuan langsung tunai (BLT). Di sinilah, tampak sekali peran G-25 dalam membantu masyarakat dan pemerintah.

Model Pemberdayaan Pelaku UMKM Ala G-25

G-25 memiliki dua program pemberdayaan pelaku UMKM. Yakni, program bantuan pemberdayaan ekonomi super mikro dan pemberdayaan program pendidikan. Program pemberdayaan ekonomi UMKM diberikan kepada masyarakat kurang mampu dalam menjalankan usaha. Calon penerima manfaat ini ada dua jenis. Memiliki usaha tetapi berhenti akibat COVID 19. Tidak memiliki modal untuk melanjutkan usaha. Modal habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan mendesak. Seperti, biaya pendidikan atau perawatan rumah sakit. Jenis kedua, warga miskin yang tidak memiliki usaha. Pada jenis ini, tim G-25 mengarahkan untuk bisa berwirausaha sesuai kapasitas dan ketrampilan yang dimiliki. Usaha yang dianjurkan mempertimbangkan potensi pasar dan ketersediaan lokasi.

Bantuan pemberdayaan berupa modal barang. Menyesuaikan dengan kebutuhan usaha pemetik manfaat program ini yang sebelumnya sudah melalui tahap survey. Dalam pengertian yang lebih luas, Program ini merupakan program bantuan yang berbentuk bantuan usaha bagi masyarakat yang dalam sektor ekonomi kurang berdaya dan memiliki keinginan kuat untuk membangun usaha. Pemetik manfaat program ini juga diputuskan setelah survey dan identifikasi menyeluruh. Baik rumah (dari halaman, dapur hingga kamar mandinya), usahanya (jika memiliki usaha) dan skill serta semangat usahanya (bagi yang ingin memulai usaha).

Bantuan yang kita berikan juga berbentuk barang sesuai daftar kebutuhan riil untuk usaha calon penerima manfaat. Setelah dilist kebutuhan, tim G-25 mengajak calon penerima manfaat ke toko untuk belanja. Dalam survey kelayakan, calon pemetik manfaat akan diarahkan untuk memilih jenis usaha yang cocok. Kemudian didiskusikan dengan salah satu tim ahli wirausaha G-25, khususnya prospek usaha. Intinya, dalam program pemberdayaan UMKM super mikro ini, tidak ada bantuan uang kepada calon pemetik manfaat. Keputusan ini cukup beralasan. Pasalnya, banyak warga miskin yang mendapat bantuan modal berupa uang cash, malah digunakan untuk

kepentingan lain. Salah satunya, membeli ponsel dan kebutuhan rumah tangga lain. Sehingga uang itu akan habis begitu saja tanpa ada wujud usahanya. Apabila, penerima manfaat memiliki hutang mendesak, G-25 tetap membantu melunasi hutangnya. Syaratnya, calon pemetik manfaat bersedia membuka usaha dengan serius.

Dalam merealisasikan program ini, G-25 sangat berhati-hati. Misalnya, harus membantu melunasi hutang, relawan yang akan menyerahkan uang secara langsung kepada pemberi hutang. Sikap kehati-hatian dalam penggunaan dana G-25, sangat beralasan. Dana yang dikelola G-25 merupakan amanah donatur. Tidak terikat secara hukum. Penerima manfaat tidak akan mendapat konsekuensi hukum, sekalipun tidak menggunakan bantuan sebagaimana mestinya. Apalagi, nilai bantuannya sangat kecil ketimbang bantuan dari pemerintah. Menariknya, tidak semua calon pemetik manfaat, mau menerima bantuan G-25. Sebagian, malah menolak ketika hendak dibantu untuk modal usaha. Mereka justru lebih suka bekerja kepada orang lain, sekalipun peluang dan hasilnya lebih kecil dari wirausaha.

Untuk itu, Rusman selaku bendahara G-25 mengungkapkan, usulan nama calon pemetik manfaat dari pembina, pengurus, relawan dan tokoh masyarakat, tidak disetujui semua. Secara garis besar, ada faktor penolakan realisasi program. Pertama, penolakan dari calon penerima bantuan. Kedua, penolakan dari tim kajian G-25. Calon penerima manfaat menolak, karena bantuan uang tunai. Selain itu, ada yang sudah terikat dan tersandera oleh modal usaha dari rentenir. Sementara pembatalan realisasi dari tim G-25, karena calon pemetik manfaat tidak mau membuka usaha.

”Mereka (calon pemetik manfaat) ada yang fokus minta bantu uang tunai. Ketika diajak berwirausaha tidak mau. Ada juga yang membuat usaha abal-abal. Itu terungkap ketika tim surveyor G-25 mendatangi rumah calon pemetik manfaat,” Wawancara Rusman Hadi, bendahara G-25, November 2021.

Temuan menarik dari penelitian ini, adalah terdapat dua kerentanan yang dihadapi warga miskin berdasarkan data dari G-25, khususnya pasca COVID 19. Realisasi program pemberdayaan ekonomi warga miskin, terkendala karena 2 faktor. Pertama, calon pemetik manfaat gagal mendapat bantuan modal usaha, karena tidak bisa lepas dari

ikatan rentenir. Salah satu contoh kasus terjadi pada calon penerima manfaat di perumnas Kamal, Bangkalan. Penjual rujak, nasi dan gorengan ini, menolak bantuan modal usaha dari G-25. Padahal usahanya sudah sangat produktif. Setiap hari, ibu dua anak ini bisa memperoleh keuntungan bersih hingga Rp 500 ribu. Pendapatan itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Setelah di interogasi tim G-25, ternyata pendapatannya habis untuk menutup hutang berbunga kepada rentenir. Hal ini yang membuat yang membuat ibu tersebut menolak tawaran modal dari G-25. Tekanan dari rentenir sangat kuat.

Kondisi tersebut yang disebut Robert Chambers dalam Bagong (2013), sebagai perangkap kemiskinan (Deprivation Trap). Ada lima jebakan kemiskinan, pendapatan rendah, fisik lemah, keterasingan, kerentanan dan ketidakberdayaan. Apa yang dialami calon penerima manfaat di atas, tergolong pada perangkap kemiskinan yang ke 4, yakni kerentanan. Calon pemetik manfaat yang memiliki pendapatan cukup besar setiap hari, tetapi tidak mampu menutup lobang hutang kepada rentenir. Putaran pinjamam modal selaras dengan putaran Bunga hutang yang besar. Kerentanan ini, seharusnya menjadi fokus dan prioritas untuk dapat diselesaikan oleh G-25, melalui program pemberdayaan UMKM super mikro. Solusi untuk melepaskan warga miskin yang rentan ini, harus ada pengalihan modal dari rentenir ke G-25. Masalahnya hanya dalam hubungan antara pemilik hutang dan piutang (rentenir) sudah terbangun seperti patron klien.

Perangkap kemiskinan lain yang dihadapi pemetik manfaat program G-25 adalah ketidakberdayaan. Rusman Hadi mengungkapkan, ada beberapa pemetik manfaat yang mengalami pasang surut usahanya. Setelah mendapat bantuan modal usaha dan usaha berjalan. Kondisi yang tidak diinginkan terjadi dan mengakibatkan usahanya bangkrut. Antara lain, pasangan hidup meninggal, terutama tulang punggung keluarga. Masalah ini tidak berkaitan dengan minimnya pengembangan usaha. Ini berkaitan langsung dengan psikologi lelaki dan perempuan. Lonjakan harga barang-barang bahan baku untuk usaha. Kenaikan harga kebutuhan rumah tangga ini menimbulkan berkurangnya hasil produksi dalam usaha. Bencana alam yang sedang dihadapi sejumlah pemetik manfaat G-25 adalah pandemi

COVID 19. Terakhir adalah penyakit. Tidak sedikit pemetik manfaat G-25 yang sudah berjalan usahanya, tiba-tiba mangkrak. Uang hasil dan untuk modal usaha habis untuk biaya perawatan rumah sakit. Sekalipun mereka memiliki kartu BPJS, tetapi tidak semua tercover. Misalnya, uang untuk transportasi ke rumah sakit.

”Ada sebagian pemetik manfaat yang terpaksa kita bantu dua kali karena bangkrut. Penyebabnya, karena faktor eksternal yang kita juga sangat memaklumi. Misalnya, terkena penyakit kronis yang harus berobat, atau uang modal dan hasil usaha dialihkan untuk kebutuhan keluarga yang mendesak lainnya. Misalnya untuk membayar biaya pendidikan anaknya,” Wawancara Rusman Hadi, bendahara G-25, November 2021.

Berdasarkan masalah di atas, G-25 juga mengembangkan program pemberdayaan pendidikan anak dari pemetik manfaat. Program ini bersifat incidental. Biasanya muncul setelah survey kelayakan calon pemetik manfaat. Program ini bukan bantuan tunai, tetapi lebih kepada pemenuhan kebutuhan pendidikan keluarga miskin. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi pemetik manfaat dan mengurangi angka putus sekolah. G-25 membantu kebutuhan sekolah seperti tas, sepatu, seragam, alat tulis, hingga SPP. Anak penerima manfaat langsung diajak ke toko untuk membeli semua kebutuhan sekolah, pembayarannya dicover oleh G-25. Untuk pembayaran SPP langsung diberikan kepada pihak sekolah.

G-25 Indonesia menilai program pemberdayaan pendidikan sangat penting. Pendidikan menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari 100 lebih penerima manfaat program G-25, mayoritas memiliki anak sekolah. Mereka sepakat, untuk merubah nasib ekonomi, salah satunya melalui pendidikan. Hal ini selaras dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 pasal 3, bahwa pendidikan nasional, selain berfungsi mengembangkan kemampuan, mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter, pendidikan menjadi faktor utama dalam membangun manusia untuk mencapai kesejahteraan. Pendidikan adalah investasi yang besar bagi masyarakat. Sebagai modal untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan layak. (Ulfa, 2015).

Kondisis saat ini, khususnya di Madura, jumlah angka putus sekolah masih tinggi. Data dinas

pendidikan tahun 2019, salah satu kabupaten di Madura, berada di urutan ke 2 se Jawa Timur, dalam hal angka putus sekolah. Masalah ini tentu selaras dengan rendahnya pendapatan masyarakat. Sehingga banyak orang tua yang memilih tidak melanjutkan pendidikan anak ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan cukup pendidikan dasar, pertama ataupun menengah. Untuk mengatasi ini peran pemerintah tidak cukup. Sebab, pemerintah lebih fokus kepada pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan. Program pemberdayaan pendidikan G-25 sangat tepat. Program ini sangat mendukung dalam mengurangi angka putus sekolah, khususnya di Bangkalan.

Pendampingan Usaha Pemetik Manfaat Belum Optimal

G-25 Indonesia termasuk komunitas sosial yang sudah program pemberdayaan masyarakat. Khususnya pelaku UMKM super Mikro. Program bantuan modal usaha, menurut Djohani dalam Anwas (2013:49), bagian dari proses merubah kelemahan menjadi sebuah potensi atau keberdayaan. Warga miskin yang memiliki keterbatasan ekonomi, menjadi berdaya dengan usaha baru. Komunitas G-25 Indonesia sudah mampu mendorong warga miskin untuk mandiri dalam mencukupi kebutuhan pokok keluarga. Pemberian modal usaha kepada warga miskin merupakan bentuk konkrit pemberdayaan. Modal usaha sangat penting untuk menciptakan wirausahawan baru di masyarakat. Modal usaha merupakan aspek penting dalam memberdayakan pelaku UMKM. Pemberian bantuan modal kepada pelaku UMKM dapat menyentuh kondisi UMKM yang serba lemah.

Dalam pemberdayaan masyarakat berkelanjutan, pemberian bantuan modal usaha saja tidak cukup. Perlu ada monitoring dan pengembangan terhadap usaha yang sudah berjalan berkat program bantuan G-25. Berdasarkan informasi dari pengurus G-25 Indonesia, proses monitoring dan pengawasan sudah dilakukan, namun kurang maksimal. Salah satu kendalanya, keterbatasan relawan dan kemampuan pengurus dalam membaca perkembangan usaha pemetik manfaat. Dari 100 lebih usaha pemetik manfaat tidak terpantau semua. Setelah menyalurkan bantuan modal usaha tidak ada tindak lanjut lagi. Ada sebagian yang usahanya berkembang. Salah satu indikatornya, menjadi donatur tetap G-25. Sementara, sebagian besar lainnya tidak ada laporan dan tidak mendapat pengawasan maksimal dari G-25.

Ada beberapa yang perlu dikembangkan dari program pemberdayaan ini. Antara lain, G-25 perlu menggandeng asosiasi pelaku usaha seperti Apindo, Kadin, dan IPMI untuk mendampingi pengembangan usaha para pemetik manfaat program G-25. Perlu ada pembinaan manajemen semi profesional agar mampu mempertahankan usahanya sesuai situasi dan kondisi. Contoh, dari bisnis kecil kuliner dapat merubah bisnis ke bahan baku makanan. Menurut Rusman Hadi, G-25 sudah melakukan beberapa upaya pengawasan dan pengembangan usaha. Salah satunya, membangun kerja sama dengan Kampus Universitas Trunojoyo Madura (UTM). G-25 menggandeng kampus negeri satu-satunya di pulau garam ini, untuk dapat membantu mengembangkan usaha para pemetik manfaat. Antara lain, pengembangan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pemetik manfaat. Seperti skill dalam menggunakan media sosial sebagai bagian dari pemasaran usaha. Memberi bekal pemahaman bentuk bisnis di era industri 4.0. Program peningkatan kemampuan pelaku UMKM super mikro dalam menghadapi era digitalisasi ke depan. Teknologi sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam mengembangkan usaha para pemetik manfaat. Target lain, adalah para pemetik manfaat dapat memperluas jenis usaha dari satu sektor kecil menuju sektor besar. Dari bisnis satu ke bisnis yang lain. Sehingga, ada beberapa penyanggah ekonomi yang dapat melindungi mereka dari perangkap kemiskinan. Namun, Rusman mengakui, beberapa target dan rencana tersebut masih belum terealisasi dengan maksimal. Salah satu penyebab utamanya, jumlah pengurus dan relawan G-25 masih sangat terbatas. Tenaga mereka lebih banyak terkuras dengan aktifitas penggalangan dana, pencatatan laporan keuangan, survey calon pemetik manfaat dan pembelian bahan pokok untuk usaha calon pemetik manfaat. Untuk itu, Rusman berharap, ada langkah konkrit dari UTM untuk membantu merealisasikan beberapa rencana tersebut. Misalnya, menjadikan yayasan G-25 sebagai salah satu tempat magang para mahasiswa. Selain itu, G-25 berupaya menggandeng pemerintah kabupaten Bangkalan, untuk membantu dalam pendampingan dan pembinaan usaha para pemetik manfaat program G-25.

IV. SIMPULAN

Dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi sangat terasa. Kebijakan pembatasan sosial membuat usaha bidang transportasi, pariwisata,

perdagangan, kesehatan melemah. Usaha rumah tangga, menjadi sektor yang paling terpuruk akibat Covid 19. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) banyak gulung tikar. Daya beli masyarakat tidak berdaya. Alternatif penguatan ekonomi dan pemberdayaan pelaku UMKM, yang dilakukan oleh komunitas G-25 di Bangkalan Madura. G-25 merupakan komunitas sosial yang bergerak di bidang sosial, ekonomi masyarakat. Aktifitas utamanya, menghimpun dana dari para donatur secara sukarela. Dana itu kemudian digunakan untuk kegiatan pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi. Ada tiga program utama dalam penguatan ekonomi dan pemberdayaan pelaku UMKM. Yaitu, program bantuan Social Charity, pemberdayaan UMKM super mikro berkelanjutan dan program pemberdayaan pendidikan masyarakat miskin.

REFERENSI

- Creswell, J. (2013). *Oualitative Inquiry and Research Design*. California: Sage Publications.
<https://id/moodys-prediksi-ekonomiindonesia-melambat-di-48-akibat-corona-eDPW>, Diiakses 9 Maret 2021, pukul 06.32 WIB.
- Nalini, Siti Nuzula Laila, *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, Vol 04, 2021
- Narayan, Deepa. (2002). *Empowerment and Poverty Reduction: A Source book*. Washington DC: The World Bank.
- Sandiasa, Gede dan Ida Ayu Putu Sri Widnyani, 2017. “Kebijakan Penguatan Lembaga Pemberdayaan dalam Meningkatkan Partisipasi Pemberdayaan Masyarakat di Perdesaan” dalam *Locus Majalah Ilmiah FISIP Volume 8 No. 1- Agustus 2017* hal 64-78
- Soetjipto, Noer. 2020. *Ketahanan UMKM Jawa Timur Melintasi Pandemi Covid-19*. Yogyakarta: K-Media.
- Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat, Mungkinkah Muncul Antitesisnya ?*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Surya, Djasuro. 2015. *Manajemen Koperasi dan UKM*. Serang: Untirta Press.
- Syafar, Muhammad, 2020, *Jurnal UIN Banten*
- Ulfa, A. F. (2015). *Pengaruh Sarana Prasarana Pendidikan Terhadap Minat Membaca Literatur Ekonomi Dan Prestasi Belajar Mata Pelajaran Ekonomi Siswa Kelas Xi Ips Sma Negeri 1 Jakenan Pati (Studi Pada Tahun Ajaran 2014/2015)*.